

**SKRIPSI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN**  
**PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DARI JASA PENAGIH**  
**HUTANG**



**Diajukan Oleh:**

**Theo Levi Situmeang**

<b>NPM</b>	<b>: 140511836</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2020**

**SKRIPSI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN**  
**PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DARI JASA PENAGIH**  
**HUTANG**



**Diajukan Oleh:**

**Theo Levi Situmeang**

**NPM** : 140511836

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN**  
**PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DARI JASA PENAGIH**  
**HUTANG**



**Diajukan Oleh:**

**Theo Levi Situmeang**

**NPM : 140511836**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Pada tanggal 11 Agustus 2020**

CS2 dipindai dengan CamScanner

**G. Aryadi, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN**  
**PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DARI JASA PENAGIH**  
**HUTANG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Agustus 2020  
Tempat :

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati , S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Anggota : G . Aryadi, S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN PERAMPASAN DARI JASA PENAGIH HUTANG”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberi kritik dan saran serta semangat dengan caranya masing-masing. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Akademik penulis yang selalu memberikan motivasi.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan senang hati bersedia membimbing dan mendampingi penulis serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen , Staff Administrasi, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium dan segenap Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua Orang Tua tercinta. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini. Terima kasih juga atas setiap doa, motivasi

dan dukungan yang sangat luar biasa diberikan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

5. Jessica Bella Situmeang, Nico Cohen Situmeang dan Pierre Harel Situmeang. Terima kasih telah menjadi saudara yang hebat yang mau mendengarkan keluh kesah, menghadirkan canda tawa, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
6. Mas Aan, Mba Ria, Rio Fernando, Fransixsus Aditya, Melvin Manggombo, Dicky F.W Kurniawan, Rony, Satrio Wibowo, Aldo , Irvan Aditya. Terima kasih sudah mau menjadi senior sekaligus teman yang selalu memotivasi dan menjadi panutan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. James Feoh, Ngrayong Agung, Joseph Lerebulan, Yosua Rumbiak, Wandy dan teman-teman kantin belakang lainnya. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara selama merantau, yang telah memberikan motivasi, doa, menghadirkan kebahagiaan, canda, tawa dan memberikan nasehat sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
8. Rio Mayrolla, Debby Wongso, Putri Napitupulu, Givena, Nayaka, Felix Rocky, Jung Purba dan teman-teman SAHABAT yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi, dan bantuan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

9. Teman-teman angkatan 14, angkatan 15, angkatan 16, angkatan 17, angkatan 18 dan angkatan 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Terimakasih telah menjadi teman selama masa perkuliahan

10. Teman-teman Projustitia dan Vertical Anomali yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

11. Bicanca, Bethany, Agnesh, Jeye dan Gege. Terima kasih telah memberikan motivasi dan doa. Terima kasih mau menjadi teman yang baik, adik yang mau mendengarkan curhatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penulis

Theo Levi Situmeang

## ABSTRACT

*The title of this research is the Police Efforts in Preventing Actions of Motor Vehicle Deprivation from Debt Collection Services. The purpose of this study is to determine the efforts of the police to protect those who have debts. This study uses normative research and primary data as primary data and secondary data as supporting data. The results of the interview were obtained by taking the results of an interview conducted by a student in Central Sulawesi. The results of this study are about the efforts of the police in preventing acts of appropriation of motor vehicles from forest collection services. However, there are still obstacles in preventing the appropriation of debt collection services, namely internal and external factors. Internal factors are caused by lack of personnel and the low number of criminal detective units, while external factors are caused by unclear status of debt collection service members and there is no clear limit on how the mechanism of debt collection services works in collecting creditors.*

*keywords: efforts, police, debt Collector, deprivation, criminal*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep .....	9
1. Upaya .....	9
2. Kepolisian .....	9

3. Perampasan .....	10
4. Kendaraan Bermotor .....	10
5. Jasa Penagih Hutang .....	10
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Cara Pengumpulan Data.....	11
4. Metode Analisis Data.....	12
<b>H. Sistematika Penulisan Hukum.....</b>	<b>12</b>
1. Pendahuluan.....	12
2. Pembahasan.....	12
3. Penutup.....	13
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan umum mengenai kepolisian .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Kepolisian .....	14
2. Tugas Kepolisian .....	15
3. Fungsi Kepolisian .....	20
4. Wewenang Kepolisian .....	23
5. Visi & Misi Kepolisian .....	27
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perampasan.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Perampasan .....	28
2. Unsur-unsur Perampasan .....	29

<b>C. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Perampasan</b>	
<b>Kendaraan Bermotor Dari Jasa Penagih</b>	
<b>Hutang.....</b>	<b>30</b>
<b>D. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Mencegah</b>	
<b>Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Jasa</b>	
<b>Penagih Hutang.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika penulisan hukum ini terbukti melakukan plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Yang menyatakan,

**THEO LEVI SITUMEANG**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam pernyataan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Tujuan Negara Indonesia, tercantum di dalam naskah pembukaan UUD NRI 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Perwujudan diantara tujuan negara tersebut, senantiasa terkait dengan persoalan keamanan. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara hukum. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi suatu tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Terwujudnya stabilitas dalam setiap

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.4.

hubungan masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur dan peraturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman pidana akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya adalah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor adalah suatu upaya paksa pengambil-alihan hak atas kendaraan bermotor yang dimiliki seseorang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia.

Ketentuan hukum tersebut di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Penagih

---

<sup>2</sup> <File:///J:/index.php.htm%20penegakan%20hukum.htm>

Hutang. Saat ini penagih hutang yang kita kenal dengan sebutan Debt Collector. Dalam istilah perbankan, pengertian *Debt Collector*/Penagih Hutang adalah pihak ketiga yang ditunjuk lembaga keuangan atau Bank untuk menyelesaikan masalah kredit macet. Biasanya hal ini kita temukan berkaitan erat dengan urusan hutang piutang di mana nasabah memiliki tunggakan kredit macet yang sudah parah. Misalnya kredit sepeda motor, mobil, rumah, kartu kredit, dan lainnya, hal itu dipasrahkan kepada Jasa Penagih Hutang. Penagih Hutang bertugas untuk melakukan eksekusi atau peyitaan barang jaminan. Kenyataannya kredit macet dalam permasalahan hutang piutang yang dimana kendaraan bermotor dijadikan sebagai obyek jaminan, sering dijumpai Penagih Hutang yang ditunjuk pihak bank/leasing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melakukan penarikan obyek jaminan yang dijaminakan dengan merampas kendaraan bermotor di tengah jalan bahkan dengan kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparaturnegara. Dalam hal ini kepolisian sebagai alat penegak hukum memiliki peran dalam menciptakan keamanan dan ketertiban warga negara. Kepolisian merupakan lembaga yang berada di garda terdepan untuk melindungi warga negara. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian adalah alat negara yang memiliki tugas dan peran untuk memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai:

“ UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DARI JASA PENAGIH HUTANG “

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan bermotor dari jasa penagih hutang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan bermotor dari jasa penagih hutang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian penulisan hukum sesuai dengan rumusan masalah adalah :

Untuk memperoleh data, kemudian mengolah serta memperoleh jawaban mengenai upaya kepolisian dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan bermotor dari jasa penagih hutang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

1. Manfaat Teoritis :



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat dijadikan untuk pengembangan ilmu hukum mengenai upaya kepolisian dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan undang-undang yang terkait.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah yang lebih baik dalam hal menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor.

### b. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepolisian sebagai alat penegak hukum untuk memberikan pencegahan yang lebih efektif terkait dengan upaya untuk mencegah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa dalam menyampaikan laporan kepihak berwajib sangat bermanfaat dalam proses penegakan hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul analisis yuridis tentang Upaya Polisi Dalam Mencegah Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor Dari Jasa

Penagih Hutang, merupakan karya asli penulis. Penulisan penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari penelitian yang pernah ada. Berikut ini adalah penulisan penelitian dengan tema yang senada dengan penulisan penelitian penulis :

1. Wilson Mangara Silalahi, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Nomor Induk Mahasiswa: 110510603, tahun 2018 menulis dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana KLITIH Di DIY. Rumusan masalahnya ialah Apakah peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana klitih yang ada di DIY sudah sesuai dengan ketentuannya ?

Hasil Penelitiannya ialah Kepolisian DIY dalam menangani tindak pidana klitih yang dilakukan oleh anak remaja di daerah Yogyakarta menempuh 2 (dua) upaya, yaitu:

a) Upaya Preventif

Kepolisian DIY dalam menanggulangi tindak pidana klitih yang dilakukan oleh anak remaja di daerah Yogyakarta dengan cara bersosialisasi, berkomunikasi, bimbingan atau arahan kepada anak remaja. Upaya ini bertujuan untuk mencegah atau meredam sebelum suatu tindak pidana klitih tersebut terjadi.

b) Upaya Represif

Dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk dapat diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial

bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana KLITIH Di DIY. Sedangkan penulis menulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor Dari Jasa Penagih Hutang.

2. Anton Rudiyanto, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Nomor Induk Mahasiswa: 070510428, menulis dengan judul Upaya POLRES Bantul Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul. Rumusan masalahnya ialah:

- a. Upaya apa saja yang di ambil POLRES Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh POLRES Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian nya ialah Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul yaitu dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan barang yang berhubungan dengan kejahatan dan upaya non penal dengan meningkatkan profesionalitas anggota POLRES, fungsi serta

pengamanan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya POLRI memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang dan dapat mendukung pekerjaannya seperti alat komunikasi, transportasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dalam memperlancar tugasnya.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah mengenai Upaya POLRES Bantul Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul. Sedangkan penulis menulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor Dari Jasa Penagih Hutang.

3. Glory Donda Monika, menulis dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya ialah Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah kota Yogyakarta?

Hasil Penelitiannya ialah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Brigadir Drs.Bustanul kepolisian di Poltabes Jogja yang merupakan salah satu bagian dari bareskrim pengkhususan terhadap penanganan tindak pidana yang sering dilakukan di wilayah kota Yogyakarta. Menurut Brigadir Drs. Bustanul pembegalan adalah termasuk bagian dari perampokan ataupun perampasan secara paksa namun kata pembegalan tersebut hanya bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat. Tindak pidana pembegalan kerap diidentikkan dengan tindakan yang dilakukan

dengan sengaja karena adanya beberapa faktor dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada malam hari di daerah rawan kejahatan. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa si korban. Tindak Pidana Pembegalan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan atau perampokan merupakan suatu yang sulit dipecahkan untuk menemukan pelaku, apabila tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, korban. Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan penulis menulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor Dari Jasa Penagih Hutang

#### **F. BATASAN KONSEP**

Penulis akan menguraikan batasan konsep yang digunakan dari Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Dari Jasa Penagih Hutang :

##### **1. Upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, iktihar, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).

##### **2. Kepolisian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### 3. Perampasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan merampas, perebutan, penyamuan, dan penyitaan.

### 4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang diigerakkan oleh peralatan teknik untuk penggeraknya, dan digunakan untuk transportasi.

### 5. Jasa Penagih Hutang

Jasa Penagih Hutang adalah orang yang bertugas menagih hutang seseorang/perusahaan, sesuai dengan surat kuasa yang didapatkan dari si pemberi kuasa.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada norma hukum.

## 2. Sumber Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif data terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 3) KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen, surat kabar.

## 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditullis terkait dengan penelitian. Bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

### b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber dari institusi Kepolisian.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### H. Sistematika Penulisan Hukum

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

#### 2. BAB II PEMBAHASAN

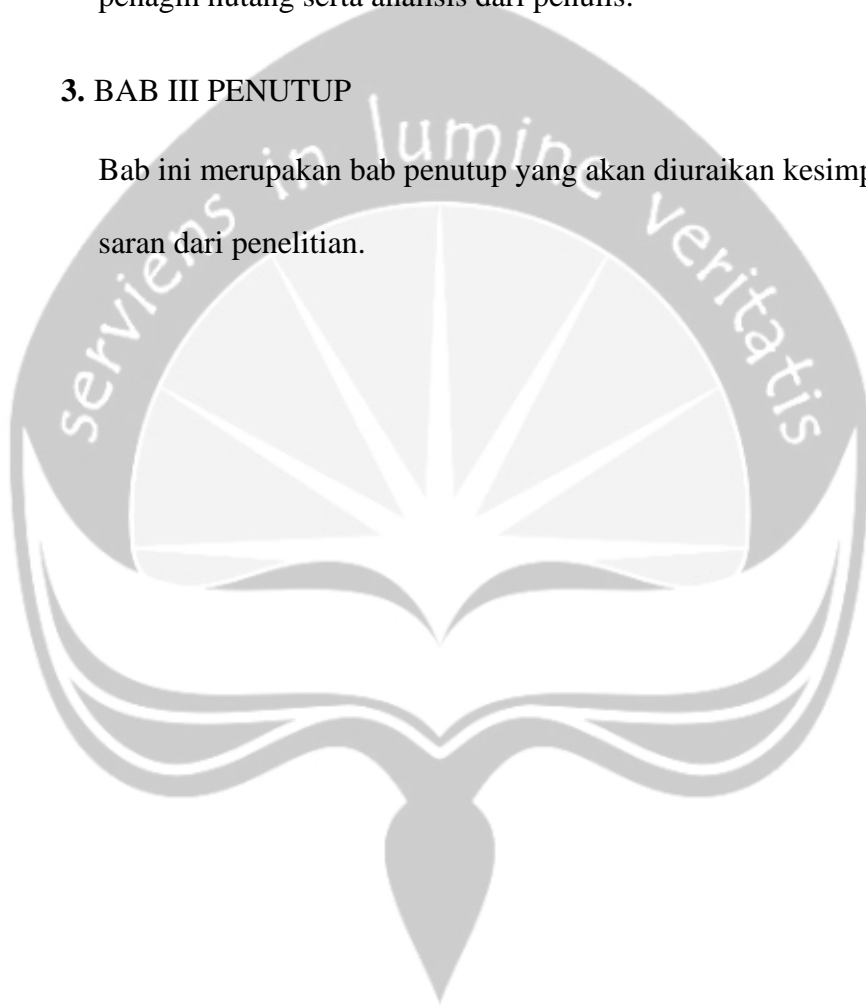
Bab ini berisi tentang pengertian, tugas, fungsi, wewenang, visi dan misi dari Kepolisian Republik Indonesia. Bab ini juga berisi tinjauan



mengenai pengertian, unsur-unsur perampasan. Dalam bab ini dibahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Jasa Penagih Hutang. Bab ini juga membahas mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan bermotor dari jasa penagih hutang serta analisis dari penulis.

### **3. BAB III PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang akan diuraikan kesimpulan dan saran dari penelitian.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh jasa penagih hutang diantaranya yaitu:

a. Upaya Pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti: Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

b. Upaya Preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, berdasarkan hasil penelitian penulis adalah dengan menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian baik Polres maupun Polsek agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian. Selain menyiagakan personil di bagian Humas, kepolisian juga membuat pengumuman, baik dalam bentuk spanduk maupun dalam bentuk stiker dan di pasang ditempat-tempat publik yang ada di kota Palu tujuan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan kepada pihak leasing atau lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan bermotor secara paksa ketika terjadi penunggakan yang dilakukan oleh pihak konsumen.

c. Upaya Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law Enforcement) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Debt Collector tidak

dibenarkan untuk melakukan penarikan secara paksa kendaraan milik dari debitur, jika hal tersebut dilakukan maka telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana kasus yang dialami oleh konsumen bernama Rahmi Sancu (36 tahun) yang sudah tiga bulan belum membayar cicilan motornya di perusahaan pembiayaan Adira Finance. Saat Ibu Rahmi Sancu berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lele Mina Kecamatan Tatanga Kota Palu tiba-tiba *debt collector* merampas sepeda motornya begitu saja dengan hanya menunjukan bukti tunggakan dari pihak Adira Finance.

2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh jasa penagih hutang, yaitu :

- a. Faktor Internal, hal ini di sebabkan oleh kurangnya personil Satuan Reserse Kriminal dan rendahnya kualitas personil Satuan Reserse Kriminal.
- b. Faktor Eksternal disebabkan oleh tidak jelasnya status anggota dari jasa penagih hutang serta belum ada batasan yang jelas bagaimana mekanisme kerja jasa penagih hutang dalam menagih para kreditur

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran yaitu Adapun saran yang disampaikan Penulis yakni sebagai berikut :

- a. Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-hak nya, sebaiknya kepolisian menambah dan

juga lebih meningkatkan kualitas dari personil kepolisian khususnya Satuan Resere Kriminal.

b. Sebaiknya Jasa Penagih Hutang/*Debt Collector* mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak

c. Sebaiknya pihak leasing/Bank sebagai kreditur mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres kepada kepolisian untuk mengawasi dan melakukan pengamanan tempat pelaksanaan penagihan hutang, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adam Chazaswi, 2002, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Eni Suharti, 2011, *Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Faud Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

Moelijatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Momo Kelana, 2003, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni.

Parsudi Suparlan, 2008, *Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Replika Aditama.

Yoyok Ucok Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet:**

Ali Saimun, Pengertian Penyelidikan dan Pengertian penyidikan, [www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-penyidikan-dan-pengertian-penyidikan.html](http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-penyidikan-dan-pengertian-penyidikan.html), diakses tanggal 13 April 2020

Humas Polri, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri, <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri>, diakses tanggal 13 April 2020

Redaksi, Pengertian, Tugas dan Kewenangan Kepolisian (Polri), <https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri>, diakses tanggal 13 April 2020

Visi dan Misi Polri, <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>, diakses tanggal 15 April 2020

### **Kamus :**

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia